

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi pada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas sekedar menunjukkan kemampuan lembaga sektor publik dengan penggunaan uang publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisiensi dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Indrayani dan Khairunnisa, 2018).

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua

urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah tersebut (Rahayu, 2016).

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang persentasenya lebih kecil kepada pemerintah pusat sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan ,baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan,maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya ke keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Menurut Susanti, Raharjo dan Oemar (2017) ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan Rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang digunakan adalah Rasio analisis varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio derajat

kontribusi BUMD, rasio analisis varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio efisiensi belanja, SiLPA tahun lalu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset Kabupaten Malaka yang memiliki potensi PAD yang tergolong kecil dikarenakan wilayahnya tidak terlalu luas. Adanya otonomi daerah dan daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah provinsi atau maupun kabupaten atau kota yang hampir terjadi di seluruh Indonesia salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah adalah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 127 Desa. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, disamping melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pemerintah juga perlu memprioritaskan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil seperti di Kabupaten Malaka.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Malaka dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Kabupaten Malaka baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Menurut Lubis dan Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Sari El Al (2020) dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat. Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan hasil daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan bersumber dari pusat.

Tingkat belanja modal (Pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut.

**Table 1.1**  
**Realisasi Anggaran Kabupaten Malaka Tahun 2017-2021**  
**(Dalam Ribu Rupiah)**

Uraian	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	835.270.274.407	823.512.988.697	786.902.238.114	753.814.119.597	874.885.113.024	840.577.663.671	794.231.215.624	760.111.897.589	893.243.696.573	863.572828.349
Pendapatan Asli Daerah	53.308.478.854	54.789.189.990	44.644.364.769	41.059.361.102	56.326.116.137	49.196.959.327	586.166.243.559	54.531.409.057	58.937.197.457	55.380.883.238
Pendapatan Transfer	781.961.795.553	768.723.798.707	705.209.473.345	693.118.098.495	784.990.328.712	751.892.416.026	586.166.243.559	570.234.534.563	809.307.342.432	785.407.444.159
Lain-Lain PAD Yang Sah	-	-	37.048.400.000	19.635.660.000	33.568.668.175	39.448.288.318	161.626.362.514	135.345.953.968	24.999.156.864	22.784.500.952
BELANJA	915.295.420.041	826.431.213.709	853.619.701.338	772.784.467.689	894.540.312.212	796.298.947.984	860.921.831.478	809.552.027.293	916.665.240.334	795.040.558.503
Belanja Operasi	648.240.961.347	593.083.654.412	686.031.669.264	633.769.136.969	702.093.845.075	655.224.205.575	748.774.767.405	723.100.264.329	565.233.347.178	496.199.421.761
Belanja Modal	255.369.170.798	222.048.971.977	157.436.139.046	128.957.638.492	192.106.179.073	141.074.742.408	99.005.162.698	77.981.322.988	155.579.360.779	119.311.564.719
Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	7.918.000.000	340.288.064	-	11.595.050.000	6.960.950.000	37.011.963.164	22.754.704.817
Transfer	1.685.287.896	1.298.587.320	2.151.893.028	2.139.692.228	1.805.288.911	1.619.431.631	1.546.851.375	1.509.489.976	158.840.569.213	156.774.867.205
Surplus/ Defisit	(80.025.145.634)	(2.918.225.011)	(66.717.463.224)	(18.970.348.029)	-	-	(66.690.615,.53)	(49.440.129.704)	(23.421.543.76)	68.532.269.845

PEMBIAYAAN										
Penerimaan Daerah	100.535.145.634	99.487.145.634	79.217.463.224	79.298.088.275	33.960.488.099	53.299.388.649	86.690.615.853	102.850.396.587	33.421.543.761	34.626.443.330
Pengeluaran Daerah	20.510.000.000	20.519.457.336	12.500.000.000	12.983.547.970	12.500.000.000	13.223.171.141	20.000.000.000	20.089.764.828	10.000.000.000	10.000.000.000
Pembiayaan Netto	80.025.145.634	78.967.688.298	66.717.463.224	66.314.540.305	21.460.488.099	40.076.217.508	66.690.615.853	82.760.631.759	23.421.543.761	24.626.443.330
SiLPA	-	76.049.463.286	-	47.344.192.213	-	82.753.501.564	-	33.320.502.055	-	93.158.713.176

*Sumber :Laporan Realisasi APBD Dinas BPKPD Kabupaten Malaka*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tentang Laporan Realisasi (LRA) anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2017-2021 realisasi baik pendapatan, belanja, pembiayaan masih mengalami Fluktuasi (naik turun) dan banyak anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan pemerintah belum secara matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan belum mencapai target yang diterapkan. Oleh sebab itu dari data diatas perlu dilakukan analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Malaka dengan menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada Pemerintah Kabupaten Malaka pada suatu periode tertentu. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten malaka tahun anggaran 2017-2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten malaka tahun anggaran 2017-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi instansi pemerintah daerah didalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien khususnya dengan pendekatan Rasio keuangan dalam menentukan kebijakan arah dan strategis didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan memperluas wawasan pembaca tentang kinerja keuangan daerah khususnya keuangan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malaka.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai rasio -rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan terhadap APBD untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malaka serta dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.